

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum Pembangunan Nasional tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat. Namun angka kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang terus membayangi pelaksanaan pembangunan yang ada. Kemiskinan di sini dapat ditandai dengan adanya pengangguran dan sebuah kondisi yang tidak berdaya. Oleh karena itu kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta tidak dapat ditunda penanggulangannya (Kurniati, 2013). Sehingga dibutuhkan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan (Corynta, 2011).

Sehingga, masyarakat harus mampu berperilaku responsif guna tercapainya fungsi dari pemberdayaan. Dalam hal ini tentu responsifitas masyarakat dapat dilihat berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat sendiri dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan masyarakat yang memiliki tujuan dan kebutuhan yang sama dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Pengertian partisipasi sendiri sangat beragam. Dalam konteks ini, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan suatu kebijakan Pemerintah. Sehingga masyarakat tidak lagi menjadi objek dari pembangunan saja tetapi menjadi subjek pembangunan, dimana masyarakat berperan dalam menyampaikan aspirasi, menentukan pilihan, memanfaatkan peluang dan menyelesaikan masalahnya (Uceng, 2019).

Tidak bisa dipungkiri bahwa partisipasi masyarakat menjadi dasar modal utama pada setiap perencanaan kebijakan, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat itu dapat dipengaruhi oleh peran *stakeholder*, kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Tidak sedikit program pemerintah yang menggunakan pola pendekatan partisipatif, namun dalam prakteknya bukan bentuk partisipasi tetapi lebih kepada mobilisasi dan juga prosesnya bukan *bottom-up* tetapi *top down*. Seringkali masyarakat dipaksa tanpa adanya dorongan dari hati nurani untuk ikut berpartisipasi dalam program yang manfaatnya sedikit bagi masyarakat dengan dalih mengatasnamakan partisipasi (Mustanir, 2018).

Sehingga didorong dengan perkembangan era saat ini, partisipasi aktif masyarakat menjadi hal yang tidak bisa diabaikan dan menjadi faktor fundamental dalam pengurangan kemiskinan. Isu yang memang paling menonjol dalam persoalan kemiskinan adalah rendahnya partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi produktif. Hal ini disebabkan berbagai macam faktor, diantaranya adalah rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan kondisi yang demikian, seseorang akan semakin terjebak didalam lingkaran kemiskinan (*poverty trap*) (Nurmanaf, 2003).

Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan memerlukan sebuah pendekatan yang bisa meningkatkan potensi yang dimiliki sehingga mampu memberikan dorongan kemandirian dan konsep utama dari pemberdayaan tersebut dapat terwujud. Banyak program dengan konsep pemberdayaan sudah diimplementasikan untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan salah satunya adalah dapat dilakukan melalui sebuah kebijakan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo untuk kemudian meluncurkan program guna mengembangkan produk lokal. Program tersebut untuk disebut dengan program “Bela Beli Kulon Progo”.

Tujuan utama dari pelaksanaa program ini sendiri adalah sebagai upaya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Program ini memiliki semangat yang disebut dengan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang dirumuskan sedemikian rupa untuk mekanisme upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan sekaligus dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian pertumbuhan ekonomi yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Gerakan Bela-Beli Kulon Progo merupakan gerakan sosial yang dirintis oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan berlandaskan aspek pemberdayaan masyarakat dalam RPJMD. Awal konsep dari Gerakan “Bela Beli Kulon Progo” sebenarnya untuk merebut pasar di negeri sendiri, maka berkenaan untuk mencapai tujuan mulia tersebut Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengikrarkan Bela Beli Kulon Progo guna memberi dukungan dan sekaligus sebagai tekad dan wujud keberpihakan dan pembelaan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada seluruh komponen yang ada baik petani, pelaku UMKM, Koperasi, BUMD, Perusahaan, dan seluruh masyarakat Kulon Progo dengan memanfaatkan, menggunakan,vmengonsumsi, membeli, dan mengembangkan serta mencintai produk-produk lokal dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi lokal KulonvProgo. Pada bagian berikutnya dalam konteks regional dan nasional, gerakan ini dapat diterapkan untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan Negara dalam menghadapi system ekonomi kapitalis/pasar bebas.

Selama lebih kurang 6 tahun program Bela Beli Kulon Progo ini dilaksanakan ternyata memberikan dampak dan pengaruh yang cukup positif serta signifikan terutama guna untuk terciptanya *multiplier effect* bagi perekonomian daerah khususnya menjadikan produk-produk lokal Kulon Progo menjadi “Raja di Negeri Sendiri”. Di samping hal-hal yang umum Gerakan “Bela Beli Kulon Progo” juga merupakan salah satu bentuk kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian daerah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa program Bela Beli Kulon Progo ini berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Gambar 1.1 Angka Kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo



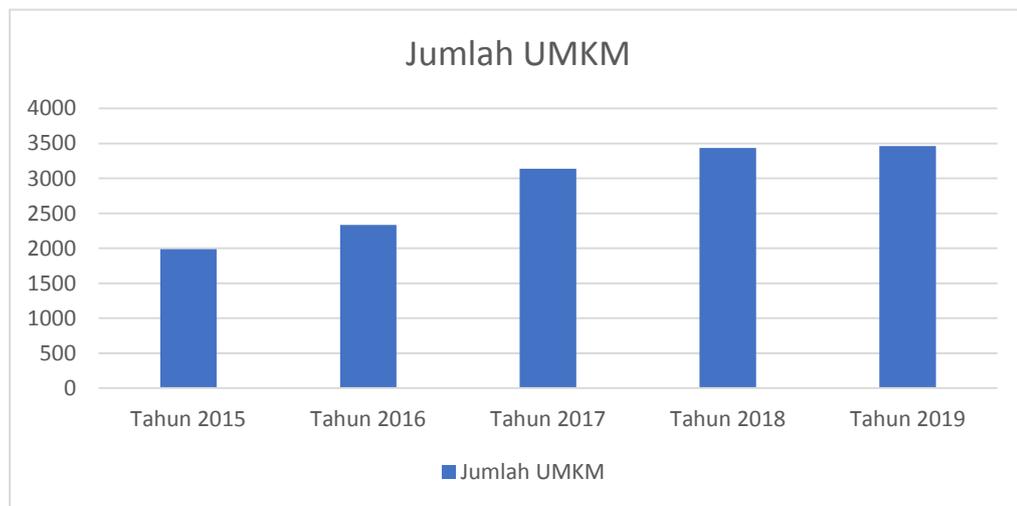
Sumber : Badan Pusat Statistika DIY, 2018

Hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yang terus mengalami penurunan. Dari data dapat kita lihat bahwa kemiskinan menunjukkan ada penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan sebesar 5 % yaitu dari 20,03 % pada tahun 2017 menjadi 15,03 % pada tahun 2018. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam Program ini memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa sejak digalakkanya program Bela Beli Kulon Progo ada beberapa keberhasilan yang diperoleh melalui program Bela

Beli Kulon Progo khususnya angka kemiskinan mengalami penurunan namun tetap tergolong masih tinggi. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan besarnya manfaat dan dampak Program Bela Beli Kulon Progo bagi pemberdayaan dan kemandirian Kulon Progo, maka program ini tidak hanya perlu terus dilanjutkan tetapi akan dikembangkan sesuai dengan potensi, kondisi, dan kebutuhan.

Gambar 1.2 Jumlah UMKM di Kabupaten Kulonprogo



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, 2019

Selain itu dengan adanya program Bela-beli Kulonprogo jumlah angka UKM di Kabupaten Kulonprogo juga meningkat. Dapat kita lihat bahwa pelaku usaha mikro mencapai 3000 unit pada tahun 2019. Berbeda jauh dengan pada tahun 2015, jumlah umkm pada Kabupaten Kulon Progo hanya mencapai angka 1000 unit. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo terus meningkat dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Bela-beli Kulon Progo.

Dengan demikian berkenaan dengan konteks partisipasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo maka peneliti ingin melihat sejauh mana tingkat partisipasi dari masyarakat dalam mensukseskan Program Bela Beli Kulon Progo. Selain itu dalam penelitian ini juga

ingin melihat faktor apa yang kemudian muncul dan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat Kulon Progo untuk mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk memperkenalkan dan mengenalkan gerakan Bela Beli Kulon Progo sehingga mampu bertahan hingga saat ini. Oleh sebab itu maka peneliti mengambil judul dalam penelitian ini “Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Bela-Beli Kulon Progo Tahun 2017-2018”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bela-Beli Kulon Progo Tahun 2017-2018 ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bela-Beli Kulon Progo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dilaksanakan untuk :

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bela Beli Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perogram Bela Beli Kulon Progo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang diperoleh oleh pembaca :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi baru untuk melihat faktor apa saja yang memengaruhi dalam konteks keterlibatan partisipasi masyarakat.
2. Sebagai media pembelajaran yang dapat menunjang sistem pembelajaran khususnya terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
3. Dapat memberikan wawasan berupa informasi terkait hasil yang ditimbulkan dalam sebuah pelaksanaan program.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah, dalam menentukan kebijakan pelaksanaan program harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga pelaksanaan program tersebut akan berdampak positif dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Selain itu diharapkan mampu menjadi masukan bagi para Pimpinan baik di Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat untuk nantinya mampu melihat faktor apa saja yang kemudian timbul dan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Literature Review

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	M Haidar Daulay, 2018.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wana Wisata Di Kawasan Hutan Lindung Rph Mangunan Bdh Bantul-Kulon Progo KPH Yogyakarta.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat memegang peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan wana wisata RPH Mangunan. Partisipasi ide dan pemanfaatan berada pada tingkat sedang, pada partisipasi pelaksanaan berada pada tingkat tinggi, dan pada partisipasi monitoring evaluasi berada pada tingkat rendah. Faktor umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, insentif, lama terlibat pengelolaan, dan keanggotaan koperasi dalam penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap besarnya tingkat partisipasi. Strategi pengelolaan wana wisata adalah strategi strengthsopportunities yaitu menggunakan kekuatan organisasi pengelolaan untuk memanfaatkan peluang.
2.	Suwari Akhmaddhian & Anthon Fathanudien, 2015.	Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi Di Kabupaten Kuningan).	Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kuningan sebagai kabupaten konservasi adalah langkah maju karena berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membantu perlindungan dan pelestarian lingkungan yang akan menciptakan lingkungan yang indah dan sehat. Bentuk partisipasi masyarakat kabupaten kuningan yaitu melalui lingkungan perawatan pengantin (pepeling), siswa

			prihatin dengan lingkungan (seruling) dan pejabat terkait. Tentang lingkungan.
3.	Elida Imro'atin Nur Laily, 2015.	Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif.	Perencanaan Partisipatif pada Desa Sugio dapat dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan selama ini. Selama ini musrenbangdes hanyalah sebagai formalitas, keputusan program pembangunan tetap berasal dari Pemerintah Daerah yang jarang sekali memperhatikan hasil Musrenbangdes itu sendiri.
4.	Heri Kusmanto, 2013.	Peran Badan Permasyarakatan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam tingkat desa di ambil oleh Badan Permasyarakatan Desa. Dimana peran dari Badan Permasyarakatan Desa tersebut membuat Pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Meskipun masih terdapat beberapa aparat dari Badan Permasyarakatan Desa tersebut yang masih belum melaksanakan tugasnya dengan baik.
5.	Ivan Kurnia Adi & Mardwi Rahdriawan, 2016	Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Psbm) Di Kelurahan Mangunharjo, Semarang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program sangat dekat dengan kecenderungan hubungan kedekatan dengan fasilitator pelaksana program. Maksudnya adalah semakin fasilitator tidak menjelaskan secara rumit dan campur tangan yang lebih sedikit

			maka partisipasi masyarakat akan meningkat.
6.	Eva Kurniasari, Ernani Rustiadi, Fredian Tonny, 2013.	Strategi Pengembangan Ekowisata Melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Studi Kasus Komunitas Kelurahan Kalimulya Kota Depok.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal partisipasi masyarakat masih dalam batasan pemberian gagasan pendapat saja sedangkan untuk kemudian gagasan tersebut dijadikan sebuah kebijakan partisipasinya masih sangat lemah. Artinya partisipasi dalam pelaksanaan ekowisata tersebut masih tergolong rendah meskipun masyarakat mampu memberikan beberapa gagasan.
7.	Felix Arberd Nur Kristianto, 2015.	Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan Bela-Beli Kulon Progo.	Partisipasi masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam gerakan Bela Beli Kulon Progo masih belum optimal. Faktor yang mendorong partisipasi masyarakat kecamatan kalibawang dalam gerakan "Bela-Beli kulon Progo" adalah masyarakat memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi mereka sendiri dan mereka mampu memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan produktifitasnya dalam rangka pembangunan masyarakat.
8.	Achmad Irgi Riza Artandi, Indah Prabawati, 2018.	Partisipasi Masyarakat Dalam Open Government Partnership (Ogp) Di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Dialog Publik).	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemerintahan sudah dilaksanakan baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam pengambilan suatu keputusan Pemerintah. Dalam partisipasi tersebut masyarakat boleh

			menyampaikan gagasan-gagasan ide dan kritikan.
9.	Much. Kaotsar Asshofi, 2017.	Kebijakan Bela Beli Bupati Hasto Wardoyo dalam Perspektif Nomokrasi Islam.	Dampak kebijakan Bela Beli berdampak positif. Meningkatnya ekonomi masyarakat dan meningkatnya penjualan atas produksi daerah. Hal ini bisa tercapai karena proses kebijakan Bela Beli Kulonprogo sesuai dengan tahap-tahap kebijakan publik dan juga dengan adanya komunikasi dan disposisi yang baik dalam menjalankan kebijakan Bela Beli itu sendiri.
10.	Wibisono, Zam Basir Angga, 2017.	Strategi Kampanye Public Relations Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dalam Program “Bela Beli Kulon Progo”.	Hasil penelitian menunjukkan terjadi strategi kampanye public relations Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam program “Bela Beli Kulon Progo”, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan (aksi), dan evaluasi. Media publikasi humas yang digunakan dalam proses kampanye terdiri dari media pers, radio, televisi, pameran (exhibition), bahan-bahan cetakan (printed material), pesan-pesan lisan (spoken word), dan bentuk media public relations lainnya, yaitu new media. Pesan yang disampaikan merupakan pesan yang sederhana, vpraktis, mudah dipahami, mudah diingat, sehingga sekali mendengar atau membaca masyarakat akan menangkap intinya, yaitu “Bela Kulon Progo, Beli Produk Kulon Progo”. Dalam pesan tersebut terdapat proses edukasi bahwa sangat penting untuk membela dengan cinta dan bangga pada

			produk lokal Kulon Progo dan persuasi yaitu mengajak masyarakat untuk membela Kulon Progo dengan membeli produk asli Kulon Progo.
--	--	--	---

Jika melihat hasil penelitian terdahulu bahwa konteks partisipasi masyarakat hanya terjadi sebagai bentuk formalitas dalam pelaksanaan kebijakan. Artinya bahwa masyarakat tidak berpartisipasi secara langsung terhadap kebijakan yang ada. Selain itu dalam penelitian terdahulu juga belum ada yang melihat pola faktor yang timbul dalam partisipasi masyarakat untuk kemudian mempengaruhi partisipasi dalam sebuah pelaksanaan program. Sehingga dalam penelitian ini selain melihat tingkat partisipasi masyarakat khususnya dalam konteks Gerakan Bela Beli Kulon Progo juga ingin melihat faktor yang muncul dan mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang harus diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Maharrani, Isnati, & Astiena, 2015).

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya, implementasi di konseptualisasi sebagai suatu proses atau suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran atau sejauh mana tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan. Artinya tingkat abstrak yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial. Sehingga, implementasi sebagai suatu konsep semua kegiatan. Sekalipun implementasi merupakan fenomena yang kompleks, konsep itu bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian (Celiani, Akbar, & Yani, 2018).

Implementasi adalah sesuatu yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi merupakan tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Komaruddin, 2018).

Lebih jauh implementasi mencakup banyak macam kegiatan. *Pertama*, badan-badan pelaksanaan yang ditugaskan oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan di atas semuanya adalah uang. *Kedua*, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. *Ketiga*, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja, akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok target, mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

Teori *good governance* mengharuskan penggunaan atau upaya untuk merancang bangun perumusan kebijakan proses implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Ketika rancang bangun ini saling berkomplementer satu sama lain yang merupakan fokus dari ilmu pemerintahan. Sebagai suatu rancang bangun implementasi kebijakan tidak

lahir dengan sendirinya melainkan berangkat dari konsep kebijakan publik (public policy). Didalam “cara” terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan serta kinerja kebijakan diukur. Sehingga di dalam cara inilah komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan, cara ini biasa disebut implementasi. Meter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan (Kurniawan, Alexandri, & Nurasa, 2018).

Berdasarkan pandangan tersebut di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun dampak yang tidak diharapkan (spillover/negatif effects).

Walaupun para ilmuwan politik yang tertarik mengkaji kebijakan public semakin meningkat, namun masih relative sedikit yang diketahui orang mengenai proses implementasi kebijakan. Keadaan ini akan berdampak negative dalam dua hal. *Pertama*, hal ini tentu saja merupakan kekurangan yang tidak menguntungkan dalam usaha

memahami proses kebijakan. *Kedua*, kondisi ini akan mendorong terjadinya kesempatan/peleluang untuk memberikan saran yang kurang baik pada para pembentuk kebijakan. Levine, dengan melihat pada kebijakan social secara umum berkesimpulan bahwa kesulitan yang berkaitan dengan kebijakan perang melawan kemiskinan tidak berasal dari sifat program seperti misalnya kesulitan-kesulitan administrasi. Doleare dan Hammond berpendapat bahwa sedikit sekali kemungkinan yang sebenarnya bisa ditetapkan dengan keputusan atau undang-undang. Pernyataan kebijakan nasional seperti itu mungkin baru merupakan permulaan dari proses keputusan dalam menentukan apa yang akan terjadi kepada siapa dan memahami tahap selanjutnya, adalah sangat penting bagi pemahaman sepenuhnya terhadap politik. Oleh karena itu, studi implementasi menambahkan suatu dimensi baru kepada analisis kebijakan (Sarhini, 2016).

Ada beberapa alasan mengapa studi mengenai implementasi kebijakan sering diabaikan oleh ilmuwan politik. *Pertama*, pengabaian studi implementasi kebijakan sebagian besar disebabkan oleh asumsi yang naif yang tersirat dalam studi kebijakan. Mereka mempunyai asumsi bahwa sekali kebijakan itu dibuat oleh pemerintah, maka kebijakan itu akan diimplementasikan dan hasil-hasil yang diinginkan akan mendekati hasil-hasil yang diharapkan oleh para pembentuk kebijakan. Proses implementasi dianggap merupakan serangkaian keputusan-keputusan dan interaksi-interaksi biasa yang tidak layak mendapatkan perhatian dari para sarjana yang mencari substansi politik. Implementasi seakan-akan merupakan hal yang sederhana dan tidak mencukupi isu-isu besar.

Kedua, pada tahun 1960-an di Amerika Serikat pertumbuhan sistem anggaran belanja, penyusunan program dan perencanaan (PBB) merupakan teknik analitik utama

dalam mengkaji kebijakan. Hal ini telah mendorong para analisis kebijakan untuk mengabaikan masalah implementasi kebijakan. *Ketiga*, beberapa kesulitan sering kali ditemui didalam usaha mengkaji secara terinci proses implementasi kebijakan. Masalah-masalah implementasi adalah sangat kompleks dan para sarjana sering sekali dihambat oleh pertimbangan metodologi. Bila dihubungkan dengan studi perumusan kebijakan, maka analisis tentang proses implementasi menimbulkan masalah batas kajian yang sungguh-sungguh. Salah satu masalah yang sering muncul adalah dalam upaya membatasi aktor yang relevan. Disamping itu, untuk melengkapi studi implementasi membutuhkan banyak variabel dan sangat sulit untuk mengukurnya.

A. Faktor- Faktor yang Bekerja dalam Implementasi

Kebijakan diasumsikan sebagai suatu “pesan” dari pemerintah federal (pusa) kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tiga hal utama :

1. Isi yang ada dalam kebijakan
2. Format dari sebuah kebijakan
3. Reputasi aktor terlibat (Hatta, 2002).

Isi kebijakan meliputi sumberdaya, manfaat kebijakan, serta keterlibatan publik. format kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan (policy clarity), konsistensi kebijakan (policy consistency), frequency serta penerimaan isi kebijakan (receipt of message) sedangkan reputation of communicator terdiri dari legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah daerah. Selain itu terdapat empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

- a. Enviromental conditions
- b. Inter-organization relationship
- c. Resources
- d. Charecterisic implementing agencies (Trisnawati, 2016).

Kinerja pelayanan publik juga dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut :

- a. Diskresi

Langkah yang ditempuh oleh administrator untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu yang tidak atau belum diatur dalam suatu regulasi yang baku.

- b. Orientasi

Menuju sejauh mana kesediaan aparat birokrasi menerima perubahan.

Pendekatan utama dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi 3 generasi. Generasi utama yaitu pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Pada generasi ini implementasi kebijakan berkaitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik. Generasi kedua tahun 1980an adalah generasi yang mengembangkan implementasi kebijakan yang bersifat *top-downer perspective*. Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksanaan implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Yushra, 2017).

Terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni *model top down* dan *model bottom up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai

gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model top down. Sedangkan gambaran model bottom up dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan. Model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Berikut beberapa model top-down antara lain :

1. Model Implementasi Top-Down
2. Model Van Meter dan Van Horn (Kurniawan dkk., 2018).

Dalam hal ini implementasi kebijakan dapat berbentuk kebijakan seperti pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu sendiri secara etimologis berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian “proses” menunjukan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice

(KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik (Fathanudien, 2015).

Makna “memperoleh” kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya/kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan/ tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/kemampuan/ kekuatan.

Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Insisatif untuk mengalihkan daya/kemampuan/kekuatan, adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen lainnya. Pemberdayaan juga mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang belum berdaya. Pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaa serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu (Rosyida & Tonny Nasdian, 2011).

1.5.2 Partisipasi dalam Kebijakan

Pendekatan partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat dalam suatu pelaksanaan kegiatan (Sigiro, 2016). Partisipasi juga bisa dikatakan sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan dalam mempromosikan proses demokratisasi dan pemberdayaan (Gunawan, 2018). Kemudian konsep partisipasi itu sendiri sebenarnya terdiri dari konsep dikotomi instrumen *means* dan *ends*. Berbeda dengan sebelumnya, partisipasi dalam konsep politik lebih kepada sebuah situasi dimana pejabat lokal, tokoh masyarakat, LSM, birokrasi dan aktor-aktor lain yang terlibat langsung dengan program-program partisipatif, melakukan praktik yang jauh dari prinsip partisipasi. Dalam argumen efisiensi bahwa partisipasi adalah sebuah instrumen atau alat untuk mencapai hasil dan dampak program/kebijakan yang lebih baik, sedangkan dalam argumen demokratisasi dan pemberdayaan, partisipasi adalah sebuah proses untuk meningkatkan kapasitas individu-individu, sehingga menghasilkan sebuah perubahan yang positif bagi kehidupan mereka (Latif, Irwan, Rusdi, Mustanir, & Sutrisno, 2019).

Perbedaan cara pandang atas partisipasi dalam konteks pembangunan seperti di atas, akan memberikan implikasi yang berbeda dalam melakukan analisis terhadap hubungan kekuasaan dalam sebuah proses yang partisipatif dan cara bagaimana komunitas sasaran mendapatkan manfaat dari proses pembangunan. Dalam perspektif instrumental, hubungan antara masyarakat sebagai sasaran program dan pengambil kebijakan atau lembaga pemberi bantuan relatif tidak terjadi. Dengan kata lain tidak ada interaksi antara kedua pihak, sehingga desain program dan kebijakan pembangunan yang dibuat lebih banyak atau bahkan sepenuhnya berada di tangan para elite (community leader). Sementara masyarakat penerima manfaat hanya terlibat seputar implementasi

program bahkan hanya sebagai tukang. Pendekatan tujuan memandang hubungan kekuasaan dalam sebuah proses yang partisipatif mengarah pada upaya-upaya perubahan dan pemberdayaan dari masyarakat itu sendiri, sehingga harus ada kesamaan hubungan kekuasaan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan pembangunan (Ermayanti, Hendrawati, & Zamzami, 2018). Dari segi keterlibatan masyarakat partisipasi juga dapat dilihat dari tiga indikator yakni :

- a. Kesempatan Partisipasi
- b. Kemampuan Partisipasi
- c. Kemauan Partisipasi (Zaenuri, 2018).

Selain itu dalam menilai tingkat partisipasi masyarakat juga dapat dilihat melalui tiga aspek penting yakni keaktifan dari masyarakat, tanggung jawab dari masyarakat dalam keberhasilan program serta kesediaan dari masyarakat itu sendiri dalam memberikan ide. Ketiga aspek ini menjadi aspek yang sangat penting karena memiliki keterkaitan satu sama lain disamping adanya faktor yang mendukung dari partisipasi tersebut (Zaenuri, 2018). Salah satu faktor yang mendukung dalam hal ini adalah kesempatan artinya bahwa masyarakat yang akan menjadi sasaran program harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung, sehingga mereka akan mengerti bahwa apa yang diputuskan dan manfaat yang akan diambil pada saat program diimplementasikan dan selesai dijalankan (Hasim & Rohman, 2019). Dari berbagai pengertian partisipasi diatas,, konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih diartikan sebagai suatu dukungan rakyat dengan tolak ukur berupa masyarakat ikut ambil alih dalam pelaksanaan program yang telah dibuat. Dalam konteks hirarki partisipasi dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu :

1. Partisipasi yang bersifat horizontal

Artinya bahwa partisipasi dilakukan oleh sesama warga dan anggota perkumpulan secara hirerarki horizontal.

2. Partisipasi yang bersifat vertical

Artinya bahwa partisipasi dilakukan oleh bawahan dengan atasan atau bisa digambarkan memiliki hirerarki vertical (Latif dkk., 2019).

Partisipasi merupakan sebuah keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela yang berasal dari dalam ataupun luar dalam proses keseluruhan kegiatan yang bersangkutan. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari empat kegiatan utama dalam pelaksanaan program kebijakan yaitu :

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan
3. Partisipasi dalam Pemantuan dan Evaluasi Pembangunan
4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan (Nurkatamso & Listyaningsih, 2018).

1.5.3 Kemiskinan

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti sempit, kemiskinan (porper) dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, bahwa kemiskinan adalah suatu konsep terpadu (intergrated concept) yang memiliki lima dimensi, yaitu :

- a) Kemiskinan (*Proper*)
- b) Ketidakberdayaan (*Powerless*)
- c) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of Emergency*)
- d) Ketergantungan (*depedence*)
- e) Keterasingan (*isolation*) (Amri, Ikhbar, & Nuzakkir, 2016).

Selanjutnya untuk melihat indikator-indikator sosial untuk mengukur tingkat indeks kehidupan (*the level of living index*). Menurutny terdapat tiga tingkatan kebutuhan untuk menentukan tingkat kehidupan seseorang :

- a. Kehidupan fisik dasar (*basic fisical needs*), yang meliputi gizi/nutrisi, perlindungan/perumahan (*shelter/housing*), dan kesehatan.
- b. Kebutuhan budaya dasar (*basic cultural needs*), yang meliputi pendidikan, penggunaan waktu luang dan rekreasi, serta jaminan sosial (*social security*).
- c. High income, yang meliputi surplus pendapatan atau melebihi takarannya. Seseorang dapat dikatakan miskin bila mengalami “*capabilitydeprivation*” sehingga mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Kebebasan substantif memiliki dua sisi : kesempatan dan rasa aman/keamanan. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan rasa aman atau keamanan membutuhkan kesehatan (Puspita, 2015).

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan sangat beragam bergantung pada kondisi demografis, sosiografis, dan geopolitik sebagaimana disampaikan oleh Coombs dalam, menyebutkan bahwa yang terkait dengan :

(1) Penduduk

(2) Perumahan

(3) Pekerjaan.

Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah penduduk, semakin tumbuhnya pemukiman yang tidak terkendali dan kesempatan kerja yang terbatas karena pendidikan yang rendah. Hakikat penyebab kemiskinan sesungguhnya adalah melekat dalam diri individu atau sosial yang bersangkutan. Masalah kemiskinan sangat terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sehingga mereka mampu berdaya, berdiri di atas kakinya sendiri, autonomy atau memiliki daya tawar dan daya saing untuk mampu hidup mandiri.

Dengan kata lain penuntasan kemiskinan dapat diatasi melalui pendekatan pemberdayaan. Pemberdayaan dalam menuntaskan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara mengubah pikiran individu dan masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas pemberdayaan tersebut diantaranya: kegiatan pendidikan dan latihan yang dapat mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, kegiatan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, menumbuhkan lembaga-lembaga non formal dalam masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan kearifan lokal sebagai modal sosial, dan bentuk aktivitas lainnya. Kegiatan pemberdayaan tersebut merupakan pembangunan sosial yang menjadi gerakan masyarakat yang didukung oleh semua unsur mulai : pemerintah, anggota legislatif, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, organisasi sosial, masyarakat, dan juga media

massa. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan yang menyentuh semua lapisan masyarakat (Maipita, 2018).

1.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual ini dimaksudkan sebagai gambaran yang lebih jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Adapun pengertian definisi konseptual dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah sebuah proses kegiatan yang dilakukan baik oleh individu pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam sebuah mendukung sebuah pelaksanaan kegiatan Pemerintah.

c. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

1.7 Definisi Operasional

Definisi oprasional merupakan definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dalam Defenisi Oprasional ini menggunakan Teori dari (Zaenuri,2018) Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Bela Beli Kulon Progo Tahun 2017-2018 dilihat dengan menggunakan indikator :

Tabel 1.1 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
1. Tingkat Partisipasi Masyarakat	a. Keaktifan Partisipasi	1. Keaktifan masyarakat terlibat dalam pembelian produk lokal.
	b. Tanggung Jawab	2. Tanggung jawab terhadap keberhasilan Program Bela-beli Kulon Progo. Daya beli masyarakat terhadap pembelian produk lokal untuk tetap mensukseskan program Bela Beli Kulon Progo.
	c. Kesiediaan memberikan ide	3. Kesiediaan memberikan sumbangan berupa pikiran, keahlian dan ketrampilan dalam mendukung Program Bela-beli Kulon

		<p>Progo. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah masyarakat ikut serta dalam memberikan ide gagasan melalui pembuatan produk-produk inovatif lokal. Sehingga meningkatkan daya beli masyarakat di daerah Kulon Progo.</p>
<p>2. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat</p>	<p>a. Kesempatan Partisipasi</p>	<p>1. Kesempatan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi seperti adanya dukungan infrastruktur untuk menyajikan produk lokal.</p>
	<p>b. Kemauan Partisipasi</p>	<p>2. Kemauan dari masyarakat untuk ikut serta dalam partisipasi program Bela Beli Kulon Progo. Dilihat dari berkembangnya UMKM dari tahun ke tahun.</p>
	<p>c. Kemampuan Partisipasi</p>	<p>3. Kemampuan masyarakat untuk dapat ikut terlibat dalam pelaksanaan keberhasilan program Bela-Beli Kulon Progo. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah aksesibilitas dari masyarakat untuk memproduksi produk lokal, untuk membeli produk lokal, serta untuk memasarkan produk lokal.</p>

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian kualitatif ini sendiri ialah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Penelitian kualitatif ini mengembangkan beragam metode yang saling terkait yang diharapkan dapat mengembangkan pemahaman atas pokok permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam analisis data penelitian ini menggunakan metode NVivo 12 Plus melalui analisis konten. Tujuan dari metodologi ini ialah pemahaman secara lebih mendalam tentang Partisipasi masyarakat dalam gerakan Bela-beli Kulon Progo untuk mengurangi kemiskinan.

Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Di mana dalam penelitian ini menekankan pada pendeskripsian sebuah obyek masalah yang diteliti. Jadi bentuk dari hasil, laporan yang menggunakan metode kualitatif akan berbentuk narasi panjang. Dengan adanya penelitian menggunakan metode kualitatif proses temuan masalah akan lebih lengkap dan komprehensif. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Kemudian dalam penelitian kualitatif ini juga menggunakan teknik pengambilan data wawancara, observasi dan dokumentasi (Salim, 2006).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kulon Progo khususnya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini di karenakan di Kabupaten Kulon Progo mampu menjadi percontohan dalam pengurangan kemiskinan dan bahkan melalui gerakan bela beli Kulon Progo menjadi branding yang sangat baik untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

1.8.3 Unit Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan yang ada pada pokok pembahasan masalah pada penelitian ini, maka penulis akan menyusun unit analisa pada pihak-pihak terkait yaitu :

Tabel 1.2

No.	Instansi	Jumlah	Narasumber
1.	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo	1	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo.
2.	UMKM Kabupaten Kulon Progo	3	UKM Unggulan Kabupaten Kulon Progo
3.	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo	2	Masyarakat yang terlibat aktif dalam UMKM serta yang terlibat pasif dalam UMKM.

1.8.4 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penulis untuk tujuan khusus, seperti data-data yang dihimpun dari informan melalui wawancara. Dalam penelitian ini maka yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dari responden yakni :

Tabel 1.3

No.	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo khususnya Dinas UMKM Kabupaten Kulon Progo dalam program Bela-beli Kulon Progo.	Dinas UMKM Kabupaten Kulon Progo.	Wawancara
2.	Fasilitas yang mendukung masyarakat untuk terlibat dalam program Bela-beli Kulon Progo	Dinas UMKM Kabupaten Kulon Progo.	Wawancara
3.	Tingkat akses serta kemudahan masyarakat Kabupaten Kulon Progo ikut berpartisipasi dalam Program Bela-Beli Kulon Progo.	Masyarakat	Wawancara
4.	Informasi terkait kemudahan, kendala, serta pelaksanaan program Bela-Beli Kulon Progo.	Berita Nasional	NCapture

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan dokumentasi, sehingga dalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan bahan lain yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder digunakan untuk mendukung hasil penelitian dalam analisis konten tersebut.

Tabel 1.4

No.	Data Sekunder	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Jumlah UMKM yang aktif pada Kabupaten Kulon Progo	Dinas UMKM Kabupaten Kulon Progo.	Dokumentasi
2.	Data partisipasi dari tahun ke tahun masyarakat dalam pelaksanaan Program Bela-Beli Kulon Progo	Dinas UMKM Kabupaten Kulon Progo.	Dokumentasi

1.9 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan berbagai sumber data untuk mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang harus menemukan data yang akurat, jelas dan spesifik. Dalam analisis konten teknik pengumpulan data menggunakan metode NCapture. Metode NCapture merupakan alat yang digunakan dalam NVivo 12 Plus untuk mengambil data dari media online.

Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara yang dilengkapi dokumentasi setiap pelaksanaan penelitian, observasi yang dapat dilakukan baik secara individu ataupun oleh tim, dan instrumentasi yang diperlukan untuk memperoleh kekayaan informasi dalam suatu penelitian tersebut.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang bersangkutan secara langsung. Wawancara dilakukan kepada Pimpinan Dinas

UMKM Kabupaten Kulon Progo, UMKM Kabupaten Kulon Progo, serta masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

b. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Observasi dilakukan melalui tahapan pemilihan setting. Untuk teknik pengumpulan data melalui observasi terdapat dua cara yaitu periset langsung terjun secara terbuka dan periset tidak menunjukkan identitas secara terbuka saat melakukan observasi pada obyek yang di teliti. Sehingga dalam penelitian ini yang periset melakukan observasi di Dinas UMKM Kabupaten Kulon Progo, UMKM Kabupaten Kulon Progo serta masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

1.9.1 Metode Analisis Data

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai teknik analisis data tentu kita seharusnya mengetahui terlebih dahulu makna dari analisis data (Moleong, 2007). Pengertian analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan fitur Ncapture pada NVivo 12 Plus dengan mengcapture beberapa berita online. Untuk Analysis Data peneliti menggunakan fitur Cluster Analysis pada NVivo 12 Plus untuk melihat *correlation* antara informasi dalam berita online. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan metode coding untuk melihat dan menganalisis hasil melalui NVivo 12 Plus.